



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PP 39  
TRIWULAN IV  
TAHUN 2020**  
INSPEKTORAT JENDERAL

**Kementerian  
Perindustrian**

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat Jenderal Triwulan IV Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, Januari 2021

**INSPEKTUR JENDERAL**

**ARUS GUNAWAN**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal.....	1
I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program.....	1
I.3. Struktur Organisasi .....	2
BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN.....	10
II.1. Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2020 .....	10
II.2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program / Kegiatan.....	12
II.3 Rencana Aksi .....	16
II.4 Informasi Kinerja dan Realisasi Inspektorat Jenderal Tahun 2020.....	27
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN .....	35
III.1. Analisa Hasil Capaian dan Anggaran .....	35
III.2. Kegiatan Inspektorat Jenderal .....	47

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Program Inspektorat Jenderal .....	10
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 (Sebelum Perubahan) .....	12
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 (Setelah Perubahan) .....	14
Tabel 4 Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Triwulan IV.....	16
Tabel 5. Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 .....	27
Tabel 6. Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan IV .....	36
Tabel 7 Realisasi Anggaran Berdasarkan data SPAN .....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal .....	2
Gambar 2. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal .....	3
Gambar 3. Bagan Organisasi Inspektorat I .....	6
Gambar 4. Bagan Organisasi Inspektorat II .....	7
Gambar 5. Bagan Organisasi Inspektorat III .....	8
Gambar 6. Bagan Organisasi Inspektorat IV.....	9

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

### **I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program**

Agar fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2020 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi *Post Audit*, tetapi juga sebagai *Consulting Partner* (mitra konsultasi) dan sebagai *Quality Assurance* (penjamin mutu) kegiatan unit kerja.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

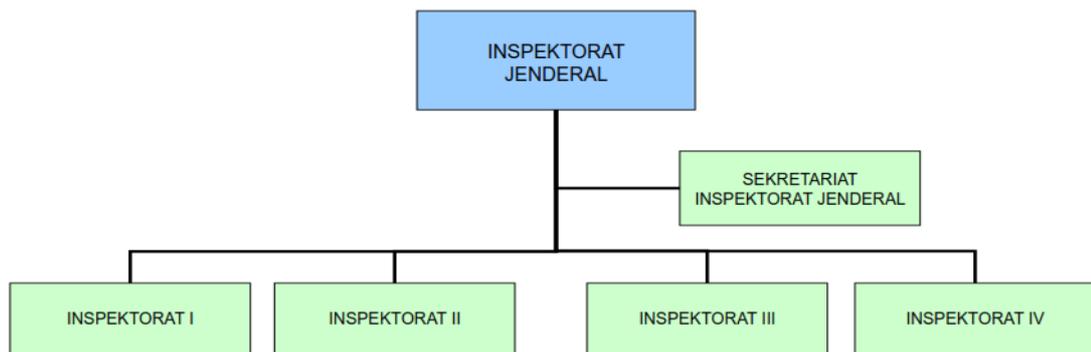
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

### I.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III; dan
- Inspektorat IV.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal**

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
- Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan;
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi; dan
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :



**Gambar 2. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal**

Inspektorat Jenderal mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bagian Program menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; dan

- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

Bagian Program, Monitoring, dan Evaluasi terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

- b. Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.

Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 2) Sub Bagian Evaluasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.

- c. Bagian Keuangan dan Umum, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik negara.

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi.

Bagian Keuangan dan Umum, terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik negara.
- 2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi.

- d. Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai; dan
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksanaan serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai.
- 2) Sub Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan konsultasi

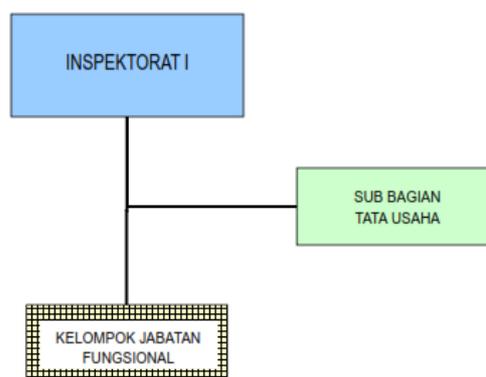
bidang pengawasan, organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

## 2) Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha
  - Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
  - Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan Organisasi Inspektorat I adalah sebagai berikut :



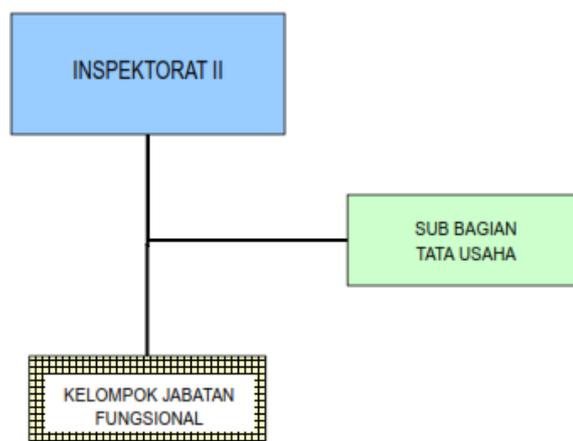
**Gambar 3. Bagan Organisasi Inspektorat I**

### 3) Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka. Inspektorat II terdiri dari :

1. Sub Bagian Program Tata Usaha
  - Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
  - Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat II adalah sebagai berikut :



**Gambar 4. Bagan Organisasi Inspektorat II**

#### 4) Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Inspektorat III terdiri dari :

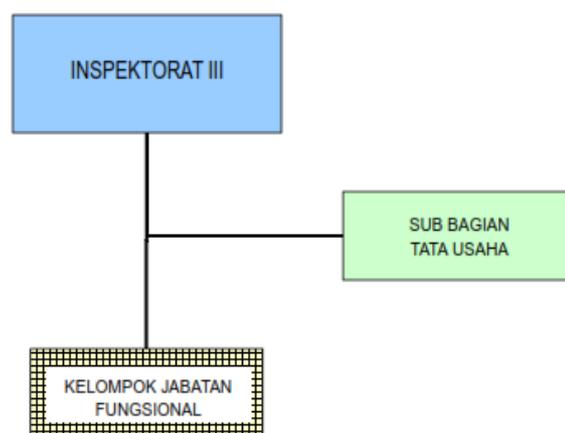
1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat III adalah sebagai berikut :



**Gambar 5. Bagan Organisasi Inspektorat III**

## 5) Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Perwakilan Kementerian Perindustrian di Luar Negeri.

Inspektorat IV terdiri dari :

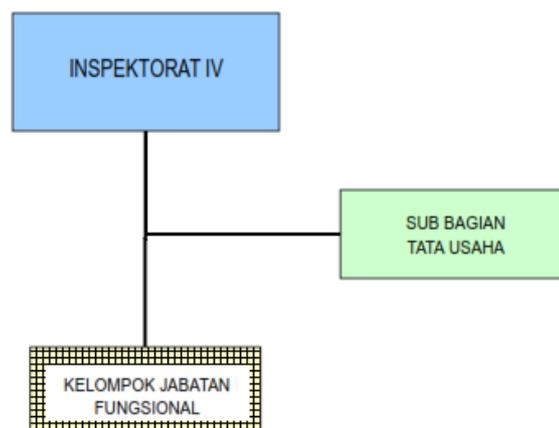
1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat IV adalah sebagai berikut :



**Gambar 6. Bagan Organisasi Inspektorat IV**

## BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

### II.1. Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dengan kegiatan pada Tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 1 Program Inspektorat Jenderal**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
1	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen Kinerja Pengawasan dan pelaporan kinerja</li> <li>- Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas</li> <li>- Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat I</li> <li>- Layanan Audit Internal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 Laporan</li> <li>- 58 Laporan</li> <li>- 1 Laporan</li> <li>- 1 Laporan</li> <li>- 1 Layanan</li> </ul>
2	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen Kinerja Pengawasan dan pelaporan kinerja</li> <li>- Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas</li> <li>- Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 7 Laporan</li> <li>- 7 Laporan</li> <li>- 2 Laporan</li> <li>- 1 Laporan</li> </ul>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
		- Layanan Audit Internal	- 1 Layanan
3	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III	- Manajemen Kinerja Pengawasan dan pelaporan kinerja - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas - Layanan Audit Internal	- 7 Laporan - 55 Laporan - 2 Laporan - 1 Layanan
4	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV	- Manajemen Kinerja Pengawasan dan pelaporan kinerja - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan - Monitoring dan Evaluasi SAKIP Cakupan Tugas Inspektorat IV - Konsultasi Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja - Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi - Layanan Audit Internal	- 12 Bulan Layanan - 7 Laporan - 7 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Layanan
5	Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	- Layanan Dukungan Manajemen Eselon I - Layanan Sarana dan Prasarana Internal - Layanan Perkantoran	- 1 Layanan - 1 Layanan - 12 Layanan

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian dapat tercapai targetnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang selama Tahun 2020 dianggarkan dengan pagu total sebesar Rp 30.111.422.000.

## II.2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Pada Triwulan IV ini, terjadi beberapa perubahan pada perjanjian kinerja Inspektorat Jenderal, diantaranya perubahan nomenklatur indikator kinerja, perubahan target pada indikator kinerja utama, dan perubahan cara pengukuran indikator kinerja. Detail perubahan dapat dilihat pada dua tabel berikut :

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 (Sebelum Perubahan)**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
<b>Perspektif Pemangku Kepentingan</b>				
1.	Terwujudnya Efektivitas, dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,5 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,5% total anggaran Kementerian Perindustrian
		1.2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	10 %	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 (satu) tahun
		1.3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
		1.4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2.1 Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan	70%	Nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi
		2.2 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Hasil penilaian Indeks Manajemen Risiko berdasarkan <i>Quality Assurance</i> BPKP terhadap Kementerian Perindustrian
<b>Perspektif Proses Bisnis Internal</b>				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	3.1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan
		3.2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 (Setelah Perubahan)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
<b>Perspektif Pemangku Kepentingan</b>				
1.	Terwujudnya Efektivitas, dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,5 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,5% total anggaran Kementerian Perindustrian
		1.2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	10 %	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 (satu) tahun
		1.3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		1.4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2.1 Nilai RB area penguatan pengawasan	70%	Nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi
		2.2 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	<i>Sampling</i> ke beberapa satker yg ditentukan (d disesuaikan dengan keterbatasan waktu dan anggaran). Penilaian dilakukan secara online dengan Metode penilaian sama dengan penilaian maturitas SPIP

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
<b>Perspektif Proses Bisnis Internal</b>				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	3.1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan
		3.2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

Alasan terjadinya perubahan yang terjadi pada indikator kinerja 2.1 Peningkatan Nilai RB Area Penguatan Pengawasan dianggap kurang sesuai, maka nomenklatur dari indikator tersebut diubah sesuai dengan kesepakatan hasil rapat pada tanggal 8 Oktober 2020. Terakhir, pada Indikator Kinerja Utama 2.2 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian juga terjadi perubahan pada metode pengukuran indikator, hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan anggaran akibat pemotongan anggaran untuk penanggulangan Covid-19 serta petunjuk teknis penilaian MRI yang belum diterbitkan oleh BPKP.

## II.3 Rencana Aksi

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tersebut dirinci dalam rencana aksi setiap triwulan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4 Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Triwulan IV**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TRIWULAN IV	
			Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
<b>Perspektif Pemangku Kepentingan</b>				
1 Terwujudnya Efektivitas, dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,5%	<b>IR I:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan Pelaksanaan Reviu</li> <li>• Pelaksanaan Reviu Pengendalian atas Pelaporan Keuangan (LK-BMN)</li> <li>• Koordinasi dan Pelaksanaan Reviu RKBMN</li> <li>• Pelaksanaan Reviu Pengendalian Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)</li> <li>• Koordinasi Audit Program Pengembangan SDM Industri</li> <li>• Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengembangan SDM Industri</li> <li>• Koordinasi Pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi dan pembinaan pengawasan kinerja</li> <li>• Pelaksanaan</li> </ul>	<b>IR I:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reviu LKBMN semester II Tahun Anggaran 2019 dan Reviu LKBMN semester I Tahun Anggaran 2020 yang telah dilaksanakan yaitu 2 unit Pusat dan 29 satker vertikal BPSDMI; 13 Pendidikan Vokasi, 9 SMK dan 7 BDI cakupan tugas Inspektorat I.</li> <li>✓ Pengawasan/Pendampingan manajemen risiko pada: 1 unit Pusat (BPSDMI) dan 6 satker vertikal yaitu Poltek AKA Bogor, Poltek STTT Bandung, SMK-SMAK Bogor, BDI Jakarta, APP Jakarta dan STMI Jakarta</li> </ul> <b>IR II:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Persiapan pelaksanaan Monev WUB Ditjen IKMA</li> </ul>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TRIWULAN IV	
			Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
			<p>Pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi (Pekerjaan Konstruksi Gedung Pendidikan, Mesin/Peralatan Pendidikan dan Pembinaan Tenaga Kerja/Tenaga Pendidik)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pembinaan Pengawasan Kinerja oleh pimpinan</li> <li>• Koordinasi dan Pelaksanaan Reviu RKAKL</li> </ul> <p><b>IR II:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit Kinerja pada Program Penumbuhan dan Pengembangan Ditjen ILMATE</li> <li>• Audit Pengembangan dan Penumbuhan IKMA dan BPIPI Sidoarjo</li> <li>• Audit BMDTP Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA</li> </ul> <p>Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring ke Dinas Provinsi Penerima Dana Dekonsentrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan Pelaksanaan Monev Program Penumbuhan Wirausaha Baru (WUB) Ditjen IKMA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reviu RKAKL</li> <li>✓ Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Penyelesaian Hibah BMN di Ditjen ILMATE &amp; IKMA</li> <li>✓ Pelaksanaan Pemetaan BMN dan penyelesaian hibah BMN di Ditjen ILMATE dan IKMA</li> <li>✓ Reviu LK dan BMN Satker Inspektorat II</li> <li>✓ Pengawasan Triwulanan Kegiatan Prioritas Ditjen ILMATE &amp; IKMA</li> </ul> <p><b>IR III:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reviu Laporan Keuangan dan BMN Semester I TA 2020 telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2020, dibagi menjadi 3 metode, yaitu metode yang dilakukan dengan mendatangi satker cakupan tugas Ir III, metode online, dan metode pelaksanaan di kantor.</li> <li>✓ Pelaksanaan Reviu RKAKL telah dilaksanakan pada bulan Juli hingga September 2020.</li> <li>✓ Pelaksanaan kegiatan konsultasi dan pengawasan pelaksanaan pengendalian</li> </ul>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TRIWULAN IV	
			Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
			Pengawalan • Triwulanan Kegiatan Prioritas Dirjen ILMATE dan Ditjen IKMA • Reviu PIPK • Reviu Perencanaan Anggaran (RKAKL) • Monev SAKIP Satker Cakupan Inspektorat II • Koordinasi Pemetaan BMN yang Belum Dihilangkan di Ditjen ILMATE dan IKMA • Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Penyelesaian Hibah BMN di Ditjen ILMATE dan IKMA • Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan Kerja Inspektorat II  <b>IR III:</b> • Koordinasi Reviu Laporan Keuangan dan BMN • Reviu Laporan Keuangan dan BMN • Reviu PIPK Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III • Pelaksanaan Reviu RK-BMN • Audit Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas	kegiatan berisiko tinggi pada 5 satker cakupan tugas wilayah Jawa Barat, telah dilakukan di bulan Juli 2020, yaitu pada satker di Bandung; BBBT, BBLM, BBT, BBK, dan BBPK.  <b>IR IV:</b> ✓ Pelaksanaan audit Ditjen KPAll dan Industri Agro telah dilaksanakan ✓ Reviu Perencanaan Anggaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TRIWULAN IV	
			Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
			<p>Aparatur Kementerian Perindustrian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit Program SIINAS (Satker Pusdatin)</li> <li>• Audit Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri</li> <li>• Koordinasi Penyusunan Reviu RKA-KL</li> <li>• Pelaksanaan Pengawasan Kinerja</li> <li>• Persiapan, Pembinaan Pengawasan Kinerja dan Consulting Manajemen Risiko Cakupan Tugas Inspektorat III</li> </ul> <p><b>IR IV:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan Program Ketahanan Pengembangan Perwilayahan Industri &amp; Akses Industri Internasional (KPAII)</li> <li>• Pengawasan Program P3DN</li> <li>• Pengawasan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro</li> <li>• Pengawasan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil</li> </ul>	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TRIWULAN IV	
			Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reviu Perencanaan Anggaran</li> <li>• Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV</li> <li>• Reviu Rencana Kebutuhan BMN Cakupan Tugas Inspektorat IV</li> <li>• Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi</li> </ul>	
	2. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	10%	<b>IR I:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan Pelaksanaan Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit</li> </ul> <b>IR II &amp; IV: -</b> <b>IR III:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas</li> <li>• Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas</li> </ul>	Pelaksanaan akan dilakukan pada Triwulan IV
	3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	<b>IR I:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas</li> </ul>	<b>IR I:</b> ✓ Sampai dengan Triwulan III, belum ada pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada cakupan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TRIWULAN IV	
			Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
			<p><b>IR II:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya</li> </ul> <p><b>IR III:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu</li> <li>• Audit dengan tujuan tertentu</li> </ul> <p><b>IR IV:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</li> </ul> <p>Ses:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan dan Pengawasan aspek kepegawaian dan hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>• Koordinasi pelaksanaan klinik konsultasi pengawasan</li> </ul>	<p>Inspektorat I.</p> <p><b>IR II, IR IV, &amp; Ses:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Telah dilaksanakan pelayanan klinik konsultasi Itjen TW IV</li> </ul> <p><b>IR III:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kegiatan audit pada satuan kerja cakupan tugas di Lingkungan BPPi dilaksanakan pada Bulan September 2020 dengan mendatangi 6 (enam) satkernya, yaitu BBBBT Bandung, BBT Bandung, BBTPPI Semarang, BBIA Bogor, BBPK Bandung, dan Baristand Industri Bandar Lampung, sedangkan satuan kerja lainnya di Lingkungan BPPi tidak di audit karena adanya pemotongan anggaran untuk percepatan penanggulangan covid-19.</li> </ul>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TRIWULAN IV	
			Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
	4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91%	<p><b>IR I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Koordinasi dan Pelaksanaan Monev Diklat Sistem 3 in 1</li> <li>•Koordinasi dan Pelaksanaan Penilaian Implementasi SAKIP</li> </ul> <p><b>IR II:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Ditjen ILMATE dan IKMA</li> </ul> <p><b>IR III:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Koordinasi Monitoring &amp; Evaluasi SAKIP</li> <li>○ Monev Kapabilitas Balai Besar dan Baristand dalam mendukung Industri 4.0 (Prioritas dalam bidang tekstil)</li> <li>○ Rapat Koordinasi Monev Kapabilitas Balai Besar dan Baristand dalam mendukung Industri 4.0</li> <li>○ Penyusunan Kuesioner Monev Kapabilitas Balai Besar dan Baristand dalam mendukung Industri 4.0</li> <li>○ Pelaksanaan Survey Lapangan Monev Kapabilitas Balai Besar dan Baristand dalam</li> </ul>	<p><b>IR I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Monev penilaian implementasi SAKIP terhadap seluruh unit Sekjen dan BPSDMI terdiri dari 6 unit Eselon II pada Sekjen. Dan 3 unit Eselon II pada BPSDMI. Serta 29 satker vertikal cakupan Tugas Inspektorat I.</li> </ul> <p><b>IR II:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Ditjen ILMATE dan IKMA</li> </ul> <p><b>IR III:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III telah tercapai 91% yang diukur dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi SAKIP, rekomendasi atas hasil reuiu, dan rekomendasi atas hasil</li> </ul>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TRIWULAN IV	
			Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
			<p>mendukung Industri 4.0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pengolahan Data Hasil Monev Kapabilitas Balai Besar dan Baristand dalam mendukung Industri 4.0</li> </ul> <p><b>IR IV:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tindak Lanjut hasil Pengawasan BPK</li> <li>• Monev SAKIP satuan kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV</li> </ul> <p><b>Ses:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut</li> <li>• Temu Teknis Penyuluhan/ Pemutakhiran Data Tindak Lanjut</li> <li>• Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal</li> <li>• Rapat Koordinasi Pengawasan</li> <li>• Bimbingan dan Pengawasan Aspek Tindak Lanjut/Evaluasi Hasil Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> </ul>	<p>audit.</p> <p><b>IR IV:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Evaluasi SAKIP cakupan Tugas Ir IV telah selesai dilaksanakan terhadap seluruh dokumen kinerja Eselon II.</li> </ul> <p><b>Ses:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal mencapai 19% dari target yang tertuang di Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 91%.</li> </ul>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TRIWULAN IV	
			Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Nilai RB area penguatan pengawasan	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forum Koordinasi PMPRB</li> <li>• Pelaksanaan Pemenuhan Aksi pencegahan korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> </ul>	<p>✓ Nilai rata-rata PMPRB unit kerja eselon I Kemenperin: Nilai akhir pemenuhan 13,78; Nilai akhir Reform: 19,97; Nilai akhir total pengungkit: 33,74</p> <p>✓ Penilaian mandiri zona integritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terlihat pemahaman yang utuh terhadap substansi 6(enam) area perubahan</li> <li>• Belum terlihat terjadinya pola pikir dan budaya kerja</li> <li>• Keterlibatan pimpinan secara aktif dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI masih rendah dll</li> </ul>
	2. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	-	Pelaksanaan akan dilakukan pada Triwulan IV

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TRIWULAN IV	
			Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
<b>Perspektif Proses Bisnis Internal</b>				
3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	<b>IR I:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Lainnya</li> <li>Koordinasi dan Penyusunan LAKIP</li> <li>Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya</li> </ul> <b>IR II:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Progrsm Kerja dan Anggaran</li> <li>Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas</li> </ul> <b>IR III:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya Cakupan Tugas Inspektorat III</li> </ul> <b>IR IV:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Dokumen Evaluasi &amp; Akuntabilitas</li> <li>Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya</li> </ul> <b>Ses:</b>	<b>IR I:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peran pengawasan lainnya berupa pemantauan saran dan prasarana pada 3 satker yaitu Politeknik AKA Bogor, Politeknik STTT Bandung, dan SMK-SMAK Bogor.</li> </ul> <b>IR II:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penyusunan Progrsm Kerja dan Anggaran</li> <li>✓ Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas</li> </ul> <b>IR III:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan pelaksanaan telah mencapai 50% yang diukur dari beberapa kegiatan pengawasan yang telah dilakukan. Sebagian besar pelaksanaan pengawasan pada triwulan IV telah sesuai dengan standar pengawasan (seperti reviu</li> </ul>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TRIWULAN IV	
			Rencana Kegiatan	Realisasi Kegiatan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Penelaahan Sejawat</li> </ul>	<p>revisi anggaran satuan kerja, audit, dan pengawalan terhadap satuan kerja cakupan tugas).</p> <p>Ses:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Monev dan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP), belum semua IR melakukan pengisian survey</li> </ul>
	2. Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja</li> <li>• Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN dan SET ITJEN</li> <li>• Reviu Perkin dan Renstra</li> <li>• Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Telah dilaksanakan penyusunan dan reviu LAKIP Itjen dan Set Itjen</li> <li>✓ Telah dilaksanakan penyusunan perjanjian kinerja</li> <li>✓ Telah dilaksanakan pra evaluasi SAKIP unit eselon II di lingkungan Itjen</li> </ul>

## II.4 Informasi Kinerja dan Realisasi Inspektorat Jenderal Tahun 2020

Telah di susun Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020, yang menggambarkan sasaran, indikator kinerja, target dan kegiatan, dengan realisasi triwulan IV sebagai berikut :

**Tabel 5. Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2020	KEGIATAN
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>					
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	<1,5%	-Realisasi Anggaran Kemenperin TA 2019: Rp 3,368,036,653,338 -Temuan BPK: Rp 4,967,582,710.63 maka, batas toleransi temuan= $\frac{\text{temuan BPK}}{\text{realisasi Anggaran Belanja Kemenperin TA 2019}}$  jadi, batas toleransi temuan material: 0.15% telah mencapai target	<b>INSPEKTORAT I</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL</li> <li>▪ Monitoring dan Evaluasi SAKIP satuan kerja cakupan tugas Insektorat I</li> <li>▪ Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan</li> <li>▪ Koordinasi pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi dan Pembinaan Pengawasan Kinerja</li> <li>▪ Pelaksanaan pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi (Pekerjaan Konstruksi Gedung Pendidikan,</li> </ul>

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2020	KEGIATAN
					<p>Mesin/Peralatan Pendidikan dan pembinaan tenaga kerja/tenaga pendidik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksanaan pembinaan pengawasan kinerja oleh pimpinan</li> <li>▪ Reviu LK dan BMN satker Cakupan Tugas Inspektorat I</li> <li>▪ Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Cakupan Tugas Inspektorat I</li> </ul> <p><b>INSPEKTORAT II</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL</li> <li>- Monev SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan (Monev WUB dan Monev DAK)</li> <li>- Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi</li> </ul>

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2020	KEGIATAN
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan penyelesaian hibah BMN</li> <li>- Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II</li> <li>- Reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan</li> <li><b>INSPEKTORAT III</b></li> <li>- Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL</li> <li>- Monev SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III</li> <li>- Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan</li> <li>- Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi</li> <li>- Pengawasan penyelesaian hibah BMN</li> <li>- Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III</li> <li>- Reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan</li> <li>- Reviu RKBMN</li> </ul>

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2020	KEGIATAN
					<b>INSPEKTORAT IV</b> - Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL - Monev SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan - Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi - Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV - Reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan - Reviu RKBMN
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	10%	Total rekomendasi: 552 Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti: masih blm ada maka, target telah tercapai, karena kinerja yang diharapkan tidak melebihi dari 10% rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti.	<b>INSPEKTORAT I, II, III, IV</b> - Audit Kinerja - Audit Khusus - Reviu RKAKL

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2020	KEGIATAN
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	80%	90%	<p><b>IR I, II, III, IV</b> Pengawasan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat</p> <p><b>SEKRETARIAT ITJEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian</li> <li>- Koordinasi pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan</li> </ul>
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja *)IKU	91%	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Total Rekomendasi untuk seluruh satker: terdapat 552 rekomendasi</li> <li>•Rekomendasi yang telah sesuai: 294</li> <li>•Rekomendasi yang belum sesuai: 79</li> <li>•Yang belum ditindaklanjuti: 179</li> </ul> <p><math>(294+79)/552</math> <b>Jadi, hingga saat ini capaian 67.57%</b></p>	<p><b>SES INSPEKTORAT JENDERAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dalam rangka Pemutakhiran data tindak lanjut</li> <li>- Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut;</li> <li>- Temu Teknis penyuluhan/pemutakhiran data tindak lanjut;</li> <li>- Tindak Lanjut hasil monitoring evaluasi dan reviu Inspektorat Jenderal;</li> <li>- Rapat Koordinasi Pengawasan</li> </ul> <p><b>INSPEKTORAT I, II, III, IV:</b> Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan</p>

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2020	KEGIATAN
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai RB area penguatan pengawasan	70%	Telah mencapai target, yaitu <b>83%</b> Cara hitung: Jumlah Indeks RB / Jumlah nilai max dalam penilaian RB =5.16/6.25*100	<b>SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL</b> - Forum Koordinasi penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian (PMPRB) - Penilaian mandiri satuan kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian Perindustrian

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2020	KEGIATAN
		Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Level 3	<b>SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL</b> - Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemenperin; - Pemetaan tingkat maturitas SPIP di lingkungan Inspektorat Jenderal; - Implementasi SPIP di lingkungan Inspektorat Jenderal <b>INSPEKTORAT I, II, III, IV:</b> - Konsultasi Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I, II, III, IV
<b>Internal Process Perspective</b>					
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	realisasi 97.2%	<b>SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL</b> - Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal  <b>INSPEKTORAT I, II, III, IV:</b> - Penyusunan Program Kerja dan Anggaran - Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas - Koordinasi peran pengawasan lainnya

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2020	KEGIATAN
					cakupan tugas Inspektorat I, II, III, IV
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Level 3 IACM berdasarkan penilaian BPKP Tahun 2019	- Melakukan <i>Self-Assessment</i> melalui Aplikasi yang dibentuk oleh BPKP untuk penilaian IACM Level 3.

## **BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN**

### **III.1. Analisa Hasil Capaian dan Anggaran**

Hingga Triwulan IV Tahun 2020 Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi anggaran sebanyak empat kali. Pagu awal sebesar Rp 49.724.030.000. Revisi pertama dilakukan tanggal 8 April 2020 dengan merevisi komponen dan tidak ada pergeseran anggaran antar output. Revisi kedua dilaksanakan pada tanggal 29 April 2020 dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang langkah-langkah penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga TA 2020 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020. Dan revisi ketiga dilakukan pada tanggal 21 September 2020. Revisi yang ketigamerupakan pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap, dan/atau ralat karena kesalahan administrasi dengan pagu tetap, yaitu sebesar Rp 30.111.422.000. Dan revisi DIPA yang keempat ini merupakan revisi pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap dan revisi administrasi. Perubahan yang keempat ini dilakukan pada bulan November berdasarkan surat pengajuan Inspektur Jenderal Nomor 321/IJ-IND/XI/2020 tanggal 20 November 2020. Pertimbangan perlunya revisi anggaran adalah antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga dan meningkatkan efektivitas kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.

Kegiatan Inspektorat Jenderal pada triwulan IV ini telah terlaksana dengan cukup baik, namun sebagian besar kegiatannya harus dilakukan secara online dan pelaksanaan pekerjaan di kantor sangat terbatas mengingat kondisi pandemi Covid-19 semakin memburuk dan berdampak signifikan, khususnya pada jajaran pejabat dan pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 (Januari - Desember) mencapai Rp. 29,151,228,596,- atau 96,81 % dari total pagu anggaran sebesar Rp.30.111.422.000,-.

Tabel berikut menggambarkan pagu anggaran dan realisasinya sampai dengan TW IV tahun 2020 :

**Tabel 6. Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan IV**

Jenis Kegiatan	PAGU Anggaran (Rp.)	Realisasi Triwulan IV			Realisasi s.d. Triwulan IV			Sisa Anggaran s.d. Triwulan IV	
		Realisasi Fisik	Keuangan (Rp.)	%	Realisasi Fisik	Keuangan (Rp.)	%	J u m l a h (Rp.)	%
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I	1,701,273,000	31.86 %	535,517,521	31.47	99.37%	1,159,715,152	99.64	6,040,327	0.36
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	958,392,000	32.75 %	311,352,400	32.48	100 %	933,873,302	97.44	24,518,698	2.56
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III	1,297,813,000	27.70 %	525,436,000	40.48	100 %	1,284,820,493	99.00	12,992,507	1.00
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV	898,773,000	30.23 %	578,327,436	64.34	100 %	882,196,940	98.16	16,576,060	1.84
Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	25,255,171,000	43.31 %	8,248,460,850	32.66	100 %	24,355,105,188	96.44	900,065,812	3.56
<b>TOTAL</b>	<b>30,111,422,000</b>	<b>41.85 %</b>	<b>10,199,094,207</b>	<b>33.87</b>	<b>99.87 %</b>	<b>29,151,228,596</b>	<b>96.81</b>	<b>960,193,404</b>	<b>3.18</b>

Capaian tersebut dihitung dari capaian pelaksanaan kegiatan masing-masing Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal dengan uraian sebagai berikut :

**a. Inspektorat I**

- Realisasi Anggaran Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I Triwulan IV Tahun 2020 (Oktober-Desember) mencapai Rp. 535,517,521,- atau sebesar 31.47% dari pagu sebesar Rp. 1,701,273,000,-.
- Realisasi Fisik Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 sebesar 99.37%.
- Berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal, kegiatan Inspektorat I yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV ini sebagai berikut:

1) Sasaran strategis 1 “Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian” dengan indikator kinerja:

(1.1) Batas toleransi temuan material pengawasan internal. Pencapaian kinerjanya yaitu:

- ✓ Realisasi anggaran Kemenperin: Rp.3.368.036.653.338,00 temuan BPK: Rp.4.967.582.710,63, maka batas toleransi temuan material: 0,15%, telah mencapai target. Untuk menunjang indikator kinerja ini kegiatan pendukung yang dilakukan yaitu Audit Kinerja, Audit Khauua, Reviu RKA-K/L tahun anggaran 2021, Reviu LKBMN Semester II tahun anggaran 2019 da semester I TA 2020, Reviu PIPK TA 2019, Reviu RKBMN TA 2021, consulting berupa pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi serta pembinaan pengawasan kinerja oleh pimpinan.

(1.2) Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti. Kegiatan pendukung yang dilakukan Inspektorat I sebagai berikut:

- ✓ Koordinasi dan pelaksanaan pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil audit. Tidak ada satupun satker cakupan tugas Inspektorat I yang menyatakan temuan tidak dapat ditindaklanjuti, sehingga realisasi indikator ini adalah 0% dan dapat memenuhi target dibawah 10%.

- ✓ Inspektorat I melakukan pelaksanaan Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit pada 3 satker yaitu SMAK Bogor, AKA Bogor dan, STTT Bandung.

(1.3) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti

- ✓ Pada triwulan IV sebagaimana dilaporkan Ketua Klinik Konsultasi bahwa Pengaduan Masyarakat Periode 1 September s/d 31 Desember 2020, terdapat sebanyak 182 pengaduan yang dilakukan secara *online* yang seluruhnya tidak berkadar pengawasan, sehingga hasil indikator ini dapat tercapai.
- ✓ Kegiatan pendukung dengan indikator ini yaitu Audit Dengan Tujuan Tertentu, yang dilaksanakan pada Pusat Pendidikan dan Pelatitan Industri (BPSDMI) pada monev kegiatan diklat 3 in 1. Penyelesaian laporan kegiatan telah dilaksanakan, sehingga realisasi untuk Indikator ini sebesar 90%.

(1.4) Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja

- ✓ Koordinasi dan pelaksanaan Monev Diklat Sistem 3 in 1
- ✓ Berkoordinasi dengan bagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, realisasi yang di capai yaitu 67.57%

2) Sasaran strategis 2 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan indikator kinerja:

(2.1) Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian

- ✓ Konsultasi Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I; Sekjen dan BPSDMI
- ✓ Koordinasi dan pelaksanaan pendampingan Implementasi Manajemen Risiko
- ✓ Realisasi diperoleh dari nilai maturitas SPIP, target telah tercapai level 3.

3) Sasaran strategis 3 “Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif” dengan indikator kinerja:

(3.1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan

- ✓ Metode penghitungan indikator ini melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner secara

online. Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan tugas yang menjadi sampel kegiatan ini. Total realisasi keseluruhan kegiatan yaitu 92.7%

(3.2) Capaian IACM

- ✓ Berkoordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal, realisasi telah mencapai target; level 3 IACM, berdasarkan penilaian BPKP Tahun 2019.

**b. Inspektorat II**

- Realisasi Anggaran Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II Triwulan IV Tahun 2020 (Oktober-Desember) sebesar Rp. 311,352,400,- atau sebesar 32.48% dari Pagu sebesar Rp 958,392,000,- dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- Berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal, kegiatan Inspektorat II yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV ini sebagai berikut:
  - 1) Sasaran strategis 1 “Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian” dengan indikator kinerja:
    - (1.1) Batas toleransi temuan material pengawasan internal. Kegiatan pendukung yang telah dilakukan Inspektorat II yaitu:
      - ✓ Telah diketahui realisasi anggaran Kementerian Perindustrian TA 2019 yaitu Rp 3,368,036,653,338
      - ✓ Telah didapatkannya nilai temuan pemeriksaan BPK sebesar Rp 4,967,582,710.63
      - ✓ Dengan membandingkan kedua angka tersebut diperoleh hasil batas toleransi temuan material pengawasan yang telah dicapai oleh Inspektorat Jenderal yaitu 0.15%
    - (1.2) Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti. Kegiatan pendukung yang dilakukan Inspektorat II sebagai berikut:
      - ✓ Koordinasi dan pelaksanaan pendampingan penyelesaian tindak lanjut hasil audit pada Ditjen IKMA yang berjumlah 10 temuan & 11 rekomendasi.

- ✓ Hasil audit pada Ditjen ILMATE berjumlah 17 temuan dan 18 rekomendasi jumlah temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti (cacat temuan) sampai dengan triwulan IV adalah 0% (Nol Persen)
- ✓ Maka target kinerja tercapai, karena kinerja yang diharapkan dibawah 10%.

(1.3) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti

- ✓ Pelaksanaan Audit Khusus
- ✓ Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya
- ✓ Inspektorat II telah selesai menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk, dan realisasi 90%.

(1.4) Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja

- ✓ Koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan di Ditjen ILMATE (17 temuan dan 18 rekomendasi) & IKMA (10 temuan & 11 rekomendasi)
- ✓ Target kinerja 80% tidak tercapai, karena hingga saat ini realisasi hanya 67.57%

2) Sasaran strategis 2 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan indikator kinerja:

(2.1) Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian

- ✓ Telah dilaksanakan penilaian SPIP secara online dalam dan proses verifikasi telah selesai, realisasi telah mencapai level 3.

3) Sasaran strategis 3 “Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif” dengan indikator kinerja:

(3.1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan

- ✓ Realisasi 92.70% dari pelaksanaan kuesioner online yang diisi oleh seluruh satker

(3.2) Capaian IACM

- ✓ Berkoordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal
- ✓ Telah tercapai Level 3 IACM berdasarkan hasil penilaian BPKP Tahun 2019

**c. Inspektorat III**

- Realisasi Anggaran Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III berdasarkan SPAN, pada Triwulan IV Tahun 2020 (Oktober-Desember) mencapai Rp 525,436,000,- atau sebesar 40.48 % dari pagu sebesar Rp. 1,297,813,000,- dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- Berdasarkan Perjanjian Kinerja, kegiatan Inspektorat III yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV ini sebagai berikut:
  - 1) Sasaran strategis 1 “Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian” dengan indikator kinerja:
    - (1.1) Batas toleransi temuan material pengawasan internal. Kegiatan pendukung yang telah dilakukan Inspektorat III yaitu:
      - ✓ Koordinasi Reviu Laporan Keuangan & BMN,
      - ✓ Audit Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
      - ✓ Koordinasi Penyusunan Reviu RKA-KL
      - ✓ Reviu RKA-KL (revisi anggaran/alokasi anggaran) TA 2020 dilaksanakan pada bulan Juli hingga September terhadap satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III.
      - ✓ Persiapan, Pembinaan Pengawasan Kinerja & Consulting Manajemen Risiko Cakupan Tugas Inspektorat III pada 5 satker wilayah Bandung pada bulan Juli 2020, yaitu BBBBT, BBLM, BBT, BBK, dan BBPK.
    - (1.2)Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti. Kegiatan pendukung yang dilakukan Inspektorat III sebagai berikut:
      - ✓ Koordinasi Kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas
      - ✓ Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas
    - (1.3) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti
      - ✓ Penyusunan Pelaksanaan Audit dengan tujuan tertentu
      - ✓ Audit dengan tujuan tertentu, pada satuan kerja di lingkungan BPPI dilaksanakan pada Bulan September 2020 dengan

mendatangi 6 satkernya yaitu BBBBT Bandung, BBT Bandung, BBT PPI Semarang, BBIA Bogor, BBPK Bandung, dan Baristand Industri Bandar Lampung.

(1.4) Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja

- ✓ Koordinasi Monev SAKIP
- ✓ Monev Kapabilitas Balai Besar dan Baristand Dalam Mendukung Industri 4.0 (Prioritas Dalam Bidang Tekstil)
- ✓ Penyusunan Kuesioner Monev Kapabilitas Balai Besar & Baristand dalam mendukung Industri 4.0
- ✓ Pelaksanaan survey lapangan monev kapabilitas Balai Besar & Baristand dalam mendukung Industri 4.0 (tidak terlaksana akibat Covid-19)
- ✓ Pengolahan data hasil Monev Kapabilitas Balai Besar & Baristand dalam mendukung industri 4.0

2) Sasaran strategis 2 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan indikator kinerja:

(2.1) Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian

- ✓ Consulting Manajemen Risiko Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat III

3) Sasaran strategis 3 “Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif” dengan indikator kinerja:

(3.1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan

- ✓ Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya Cakupan Tugas Inspektorat III

(3.2) Capaian IACM Inspektorat Jenderal

- ✓ Berkoordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

**d. Inspektorat IV**

- Realisasi Anggaran Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV Triwulan IV Tahun 2020 (Oktober-Desember) mencapai Rp 578,327,436,- atau sebesar 64.34% dari pagu sebesar Rp 898,773,000,-.
- Realisasi Fisik Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 (Januari-Desember) sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 882,196,940,- atau sebesar 98.16%.
- Berdasarkan Perjanjian Kinerja, kegiatan Inspektorat IV yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV ini sebagai berikut:
  - 1) Sasaran strategis 1 “Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian” dengan indikator kinerja:
    - (1.1) Batas toleransi temuan material pengawasan internal. Kegiatan pendukung yang dilakukan Inspektorat IV yaitu:
      - ✓ Pengawasan Program Penumbuhan & Pengembangan Industri Berbasis Agro → telah selesai dilaksanakan.
      - ✓ Reviu Perencanaan Anggaran
      - ✓ Reviu Laporan Keuangan & BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV → telah dilaksanakan pada 4 satuan kerja dalam cakupan tugas Inspektorat IV.
    - (1.2) Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti. Indikator kinerja ini belum dapat diukur. Kegiatan pendukung yang dilakukan Inspektorat IV sebagai berikut:
      - ✓ Koordinasi Kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV
      - ✓ Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pada Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV
    - (1.3) Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti.
      - ✓ Pengawasan dengan tujuan tertentu
    - (1.4) Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja. Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat IV adalah:
      - ✓ Tindak Lanjut hasil Pengawasan BPK
      - ✓ Monitoring & Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat IV

- 2) Sasaran strategis 2 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan indikator kinerja:
- (2.1) Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian
    - ✓ Konsultasi penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja
- 3) Sasaran strategis 3 “Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif” dengan indikator kinerja:
- (3.1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan. Pada indikator ini belum dilakukan pengukuran karena belum adanya kuesioner sebagai alat bantu kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh unit kerja yang menjadi cakupan tugas Inspektorat IV. Kegiatan yang telah dilakukan:
    - ✓ Penyusunan Dokumen Evaluasi & Akuntabilitas
    - ✓ Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya
  - (3.2) Capaian IACM Inspektorat Jenderal
    - ✓ Berkoordinasi dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

**e. Sekretariat Inspektorat Jenderal**

- Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Triwulan IV Tahun 2020 (Oktober-Desember) mencapai Rp 8,248,460,850,- atau sebesar 32.66% dari pagu sebesar Rp 25,255,171,000,- dengan realisasi fisik pada triwulan IV sebesar 43.31%.
- Realisasi Fisik Kegiatan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 (Januari-Desember) sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp 24,355,105,188,- atau sebesar 96.44%.
- Berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV ini sebagai berikut:
  - 1) Sasaran strategis 1 “Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian” dengan indikator kinerja:
    - (1.1) Pengaduan Masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti, Kegiatan pendukung yang telah dilakukan Sekretariat Inspektorat Jenderal yaitu:
      - ✓ Telah dilaksanakan pelayanan klinik konsultasi Itjen dan realisasi sebesar 90%.
    - (1.2) Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja
      - ✓ Dari Total 552 jumlah temuan dari seluruh satuan kerja Kementerian Perindustrian, terdapat 343 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti, ini berarti bahwa posisi capaian penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal baru mencapai 67.57% dari target perjanjian kinerja sebesar 91%.
  - 2) Sasaran strategis 2 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan indikator kinerja:
    - (2.1) Peningkatan Nilai RB area Penguatan Pengawasan
      - ✓ Telah disusun Laporan APiP dan saat ini telah diserahkan kepada KemenPAN dan RB
      - ✓ Nilai RB area penguatan Pengawasan telah diperoleh pada Triwulan III, yaitu 83%

(2.2) Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian

- ✓ Telah dilaksanakan penilaian maturitas SPIP secara online dengan metode sampling dan proses verifikasi pada Triwulan IV, dan rata-rata hasil penilaian telah mencapai level 3.

3) Sasaran strategis 3 “Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif” dengan indikator kinerja:

(3.1) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan

- ✓ Telah dilaksanakan Monev Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal, yaitu pemberian kuesioner online kepada para kepala satker, dengan realisasi 92.7%.

(3.2) Capaian IACM Itjen

- ✓ Target telah tercapai level 3 IACM, berdasarkan penilaian BPKP Tahun 2019.

Adapun realisasi anggaran per jenis belanja dilaporkan sebagai berikut:

**Tabel 7 Realisasi Anggaran Berdasarkan data SPAN**

No	Kode   Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Dana Tersedia
1	51   Belanja Pegawai	15.900.000.000	15,422,938,907	97,00	477,061,093
2	52   Belanja Barang	13.115.422.000	12,678,918,696	96,67	436,503,304
3	53   Belanja Modal	1.096.000.000	1,049,370,993	95.75	46,629,007
<b>Jumlah</b>		<b>30.111.422.000</b>	<b>29,151,228,596</b>	<b>96.81</b>	<b>960,193,404</b>
<i>Disclaimer: Realisasi berbasis aktual dan bersifat Bruto</i>					

### III.2. Kegiatan Inspektorat Jenderal

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 diperoleh melalui pencapaian pelaksanaan kegiatan Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal yang didukung sepenuhnya oleh anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun. Namun, hingga bulan November ini telah dilakukan tiga kali revisi dokumen POK dan tujuh kali revisi dokumen DIPA yang bertujuan untuk *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 di Lingkungan Inspektorat Jenderal, antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan serta mempercepat pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal. Selain itu, revisi ini juga dapat meningkatkan efektivitas kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas ini.

Berdasarkan revisi tersebut, sampai akhir Bulan Desember 2020 realisasi anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2020 yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 580,541,009,- dari pagu sebesar Rp 638,000,000,- atau sebesar 90.99%. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan PCR Swab Test serta vaksinasi influenza dan pneumonia bagi pegawai Inspektorat Jenderal pada triwulan IV ini.

Dengan adanya *New Normal*, kegiatan Inspektorat Jenderal yang dapat terlaksana pada Triwulan IV (Oktober-Desember) yaitu:

#### 1. Kegiatan Pengawasan

##### a. Inspektorat I:

###### a.1. Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober yaitu:

- Reviu RKA-K/L TA 2021 pada unit BPSDMI dan Sekretariat Jenderal;
- Audit Kinerja dan Pengelolaan BMN pada Politeknik AKOM Solo dan Politeknik ATK Yogyakarta;
- Pendampingan percepatan penanganan Covid-19 pada BPSDMI dan BDI Jakarta;
- Reviu RKBMN TA 2022 pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
- Pemantauan TLHA pada Politeknik STTT Bandung, AKA Bogor, SMAK Bogor;
- Verifikasi tindak lanjut rekomendasi temuan BPK pada Politeknik APP Jakarta;
- Reviu Laporan Keuangan Kemenperin Triwulan III TA 2020;
- Reviu usulan revisi DIPA Sekjen TA 2020.

###### a.2. Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada bulan November yaitu:

- Audit Kinerja dan pengelolaan keuangan di BDI Surabaya pada tanggal 1 November s.d. 6 November 2020;
- Audit Kinerja dan pengelolaan keuangan di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu (IFPK) Kendal pada tanggal 1 November s.d. 6 November

2020;

- Pendampingan Percepatan Penanganan Covid-19 di STMI Jakarta, APP Jakarta pada tanggal 2 November s.d. 4 November 2020;
- Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN di BPSDMI pada tanggal 16 November s.d. 30 November 2020;
- Melaksanakan Bimbingan dan pengawasan di SMAK Bogor pada tanggal 4 November s.d. 6 November 2020;
- Melaksanakan bimbingan dan pengawasan di STTT Bandung pada tanggal 9 November s.d. 10 November 2020;
- Kegiatan audit kinerja dan pengelolaan keuangan/BMN pada satker BPSDMI akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.

**a.3. Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada bulan Desember yaitu:**

- Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan BMN di BPSDMI pada tanggal 16 November 2020 s.d. 30 Desember 2020.
- Menghadiri rapat koordinasi teknis pengelolaan OSDM pasca pelantikan jabatan fungsional di Bogor pada tanggal 21-22 Desember 2020.
- Mengevaluasi TLHP Mengevaluasi TLHP pada SMK SMAK Bogor pada tanggal 28-29 Desember 2020;
- Reviu Revaluasi BMN pada Sekretariat Jenderal dan Unit kerja di lingkungan BPSDMI pada tanggal 22 – 30 Desember 2020;
- Reviu *Contract Change Order* (CCO) Pekerjaan Pembangunan PID1 4.0 pada tanggal 28 – 30 Desember 2020;
- Mengikuti rapat-rapat via zoom di lingkungan Kementerian Perindustrian;

**b. Inspektorat II:**

**b.1. Kegiatan pengawasan yang batal dilaksanakan pada bulan Oktober yaitu:**

- Menghadiri Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Reviu Anggaran Ditjen IKMA TA 2021;
- Reviu RKA-K/L 2021 Ditjen ILMATE;
- Evaluasi Pelaksanaan Verifikasi Pemanfaatan USDFS;
- Menghadiri Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN) TA 2022;
- Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Pengembangan IKM dan evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi tahun 2020;

- Menghadiri penjurian calon penerima penghargaan Upakarti Tahun 2020;
- Pendampingan penyelesaian pemeriksaan laporan keuangan Kemenperin Tahun 2019.

**b.2. Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada bulan November yaitu:**

- Pendampingan Penyelesaian hibah BMN di Ditjen IKMA (Kota Pontianak dan Singkawang) pada tanggal 4 November s.d. 7 November 2020.
- Reviu Laporan Keuangan TA 2020 Triwulan III pada Ditjen ILMATE pada tanggal 10 s.d. 21 November 2020;
- Melakukan Pemantauan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE pada tanggal 4-13 November 2020;
- Melakukan Sosialisasi manajemen perubahan Reformasi Birokrasi pada Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) Bandung pada tanggal 12-13 November 2020;
- Mengikuti Rakornas Pengadaan 2020 oleh LKPP pada tanggal 18-19 November 2020;
- Menghadiri Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Melakukan Audit BMDTP di Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA pada tanggal 16 November s.d. 30 November 2020;
- Melakukan Sosialisasi manajemen perubahan Reformasi Birokrasi pada Balai Besar Industri Agro (BBIA) Bogor pada tanggal 20-21 November 2020;
- Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Evaluasi Wirausaha Baru di Dekonsentrasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 24 November 2020;
- Menghadiri undangan Pembahasan SOTK Unit Kerja Kementerian Perindustrian pada tanggal 27 November 2020;
- Kegiatan Audit BMDTP di Ditjen ILMATE dan IKMA masih akan dilaksanakan hingga tanggal 23 Desember 2020.

**b.3. Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada bulan Desember yaitu:**

- Sosialisasi manajemen perubahan RB pada satker Kemenperin wilayah Jakarta;
- Audit BMDTP PT Chuhatsu Indonesia;
- Audit BMDTP PT Aisin Indonesia;
- Audit BMDTP PT Sanken Argadwija;
- Audit BMDTP PT Furukawa Optical;
- Audit BMDTP PT RKN Forge Indonesia;
- Audit PT Nusa Toyotetsu;
- Audit BMDTP PT Sakai Indonesia;
- Reviu Usulan revisi anggaran (Perubahan PNBK) Ditjen ILMATE TA 2020;

- Menghadiri undangan Tindak Lanjut Penyetaraan pejabat Fungsional di lingkungan Kemenperin;
- Penyusunan PKPT TA 2021;
- Penyusunan Laporan PP 39 TW IV Tahun 2020;
- Pemantauan Tindak Lanjut Evaluasi wirausaha baru pada Dekon Prov Jabar;
- Pelaksanaan reviu Buka Blokir DIPA TA 2020 Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian (IPAMP).

**c. Inspektorat III:**

**c.1. Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober yaitu:**

- Reviu Revisi Anggaran TA 2020 pada BPPI (beserta satker di Lingkungan BPPI), Inspektorat Jenderal, dan Pusdatin;
- Reviu Pagu Alokasi TA 2021 pada BPPI (beserta satker di Lingkungan BPPI), Inspektorat Jenderal, dan Pusdatin;
- Reviu Re-evaluasi BMN pada Baristand Padang, Baristand Lampung, Baristand Pontianak, Baristand Manado, Baristand Medan, Baristand Makasar, Baristand Samarinda, BBK Yogyakarta, BTPPI Semarang, BBKKP Yogyakarta;
- Pengawalan pada unit BBKB Yogyakarta, BBKKP Yogyakarta, BBT Bandung, dan BBBBT Bandung.

**c.2. Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada bulan November yaitu:**

- Reviu perbaikan RKBMN (Tiket SIMAN RKBMN) dan penyusunan Laporan Hasil Reviu RKBMN Tahun Anggaran 2022 Kemenperin;
- Pendampingan penyusunan laporan LKBMN Tahunan TA 2020 pada BBIA Bogor;
- Audit Internal pada BSI Jakarta;
- Audit Internal pada BBKK Jakarta;
- Persiapan Reviu PIPK Tahunan TA 2020 pada satker BBKK Jakarta;
- Persiapan Reviu PIPK Tahunan TA 2020 pada satker BSI Jakarta
- Audit Internal Pusdatin SIINAS.

**d. Inspektorat IV:**

**d.1 Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober yaitu:**

- Reviu LK TW III pada Ditjen Industri Agro, Ditjen KPAIL, IKFT dan Pusat P3DN;
- Penyelesaian BMN yang dikuasai pihak lain pada Ditjen IKFT, Ditjen KPAIL, Ditjen Industri Agro (terletak di Bandung, Sukabumi, Tangerang, dan Jakarta);
- Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi TA 2021 Pada Ditjen Industri Agro, Ditjen KPAIL,

IKFT dan Pusat P3DN;

- Reviu RKA-K/L TA 2020 Pada Ditjen Industri Agro, Ditjen KPAIL, IKFT dan Pusat P3DN;
- Pendampingan survey verifikasi TKDN ke Cikupa, Jatiuwung, Rawa Pasung, Ciawi, Semarang;
- Koordinasi persiapan pelaksanaan Hannover Messe 2021 dengan pihak-pihak terkait;
- Penelaahan RKBMN TA 2022 pada Ditjen Industri Agro, Ditjen KPAIL, IKFT dan Pusat P3DN;
- Penelitian dan Reviu Usulan Revisi Anggaran (Buka Blokir) Tahun 2020 pada Ditjen IKFT untuk kegiatan penyusunan profil Investasi Petrokimia Berbasis Gas di Teluk Bintuni;
- Reviu Atas RKABUN Belanja Subsidi BMDTP yang terdampak Covid-19 pada Ditjen Industri Agro TA 2020.

**d.2. Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada bulan November yaitu:**

- Penyelesaian BMN yang dikuasai pihak lain pada Ditjen Industri Agro dan KPAIL (di Kabupaten Katingan dan Bandung)
- Reviu LK-BMN Triwulan III TA 2020 pada Ditjen KPAIL, Industri Agro, IKFT & P3DN;
- Reviu LK BABUN Triwulan III TA 2020 pada Ditjen Industri Agro dan IKFT;
- Audit BMDTP TA 2020 pada Ditjen Industri Agro;
- Audit BMDTP TA 2020 pada Ditjen IKFT;
- Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan lainnya.

**d.3. Kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada bulan Desember yaitu:**

- Audit BMDTP TA 2020 pada Ditjen IKFT dan Ditjen Industri Agro;
- Reviu Reval BMN pada Ditjen KPAIL
- Penyelesaian hibah BMN pada Ditjen IKFT, Industri Agro, dan KPAIL.
- Pengawasan anggaran PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) pada Ditjen IKFT, Industri Agro, KPAIL dan Pusat P3DN;
- Pendampingan penilaian pada Ditjen IKFT, Industri Agro, KPAIL dan Pusat P3DN;
- Reviu LKBMN Triwulan III TA 2020 pada Ditjen IKFT;
- Reviu LKBMN Triwulan III TA 2020 pada P3DN;
- Reviu LK BABUN Triwulan III TA 2020 pada Ditjen Industri Agro dan IKFT;

- Audit BMDTP TA 2020 pada Ditjen Industri Agro;
- Audit BMDTP TA 2020 pada Ditjen IKFT; dan
- Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya.

## 2. Perencanaan Anggaran dan *Refocussing* Anggaran

### a. Anggaran Tahun 2020

Hingga bulan Desember 2020 ini telah dilakukan tiga kali revisi dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Inspektorat Jenderal dan tujuh kali revisi dokumen DIPA. Tujuan dilakukannya revisi ini adalah untuk *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Inspektorat Jenderal, antisipasi terhadap perubahan kondisi, mempercepat pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal serta meningkatkan efektivitas kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas ini. Refocussing anggaran yang telah dihemat selama tahun 2020 ini juga terealisasi pada Triwulan IV ini untuk penanganan Covid-19 di Lingkungan Inspektorat Jenderal serta pencegahan Covid-19 melalui pelaksanaan PCR Swab Test dan vaksinasi influenza serta vaksinasi pneumonia.

### b. Anggaran Tahun 2021

Dalam rangka penyusunan pagu alokasi tahun 2021, telah dilaksanakan Penelaahan RKAKL Pagu Alokasi Kemenperin TA 2021 bersama dengan Ditjen Anggaran pada tanggal 27 Oktober 2020. Pada tahun 2021, Inspektorat Jenderal mengajukan anggaran sebesar Rp 40,643,430,000,- yang akan digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengawasan berupa Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas masing-masing Inspektorat, Reviu LK-BMN, Reviu RKA-K/L, Reviu RKBMN, Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas masing-masing Inspektorat, *Consulting* dan Pengawasan serta kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal. Adapun rincian alokasi anggaran untuk masing-masing unit adalah sebagai berikut:

No	Unit	Pagu Anggaran
1	Inspektorat I	2.000.000.000
2	Inspektorat II	2.000.000.000
3	Inspektorat III	2.000.000.000
4	Inspektorat IV	2.000.000.000
5	Sekretariat Itjen	32.643.430.000
<b>Total</b>		<b>40.643.430.000</b>

### 3. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Data terkait penyelesaian temuan hasil pengawasan internal adalah sebagai berikut

#### Data Penyelesaian Tindak Lanjut s/d Triwulan IV Tahun 2020

No	Satuan Kerja	Jumlah Temuan	Nilai	Jumlah TL	Saldo Temuan	Jumlah Rekomendasi	SR	BSR
1	Pusat	183	Rp100.155.018	78	105	269	129	58
2	Balai Besar	41	Rp 1.453.548	41	0	53	53	0
3	Baristand	15	-	8	7	19	12	6
4	Balai Diklat	23	-	16	7	28	19	0
5	Sekolah	119	Rp 40.544.869	49	70	183	81	15
6	Dekonsentrasi	0	-	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>381</b>	<b>Rp10.374.970</b>	<b>192</b>	<b>189</b>	<b>552</b>	<b>294</b>	<b>79</b>

Metode penghitungan dari indikator ini adalah membandingkan antara jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) dan Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai rencana aksi yang dibuat oleh satker dengan jumlah total rekomendasi.

Dari data tersebut terlihat bahwa posisi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal hanya mencapai 67.57% dari target yang tertuang pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebesar 91%, yang artinya indikator kinerja yang menggunakan realisasi hasil penyelesaian tindak lanjut ini tidak tercapai pada tahun ini.

Total temuan yang harus disetor ke kas Negara Rp3.386.163.952,00 dengan target penyelesaian Desember 2020. Adapun nilai yang sudah disetor sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp1.554.434.245,00.

Kegiatan yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Triwulan IV adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan unit kerja pusat maupun vertikal terkait pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan Pemeriksaan BPK RI;
2. Menginventarisir data dan dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
3. Menyusun laporan kegiatan Temu Teknis Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal;
4. Koordinator dengan Auditor Pemeriksa untuk Verifikasi Kesesuaian Dokumen Tindak Lanjut dengan Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal;
5. Kunjungan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit pada Satker BBIA dan B4T;
6. Koordinasi dengan Unit Kerja Pusat maupu vertical untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas Saldo temuan yang belum selesai ditindaklanjuti, Koordinasi dilakukan dengan surat resmi;
7. Penyampaian Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut BPK RI pada Tim PTL BPK RI;
8. Menginventarisasi data dan dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan

internal dan eksternal;

9. Melaksanakan rapat pembahasan SPIP Inspektorat Jenderal;
10. Melaksanakan rapat pembahasan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Unit Eselon I Inspektorat Jenderal;
11. Melaksanakan rapat pembahasan SOP dan pedoman pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit.

#### **4. Pelaksanaan Penilaian Manajemen Risiko (MRI) di Lingkungan Kementerian Perindustrian**

Pelaksanaan rapat dan diskusi dengan BPKP terkait pelaksanaan penilaian Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020. Dalam rapat ini membahas tentang persiapan MRI yang akan diterapkan di lingkungan Kementerian Perindustrian. Hasil yang didapat dari rapat ini adalah akan disusun tim yang terdiri atas auditor dan personil dari Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk melakukan penilaian pada beberapa satker. Kemudian, tim menilai telah melakukan persamaan persepsi pada tanggal 4 Desember 2020.

Namun demikian, petunjuk Teknis (juknis) penilaian Index Manajemen Resiko dari Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) sampai dengan akhir tahun 2020 masih belum ditetapkan, sehingga penilaian terhadap manajemen resiko akan dilaksanakan dengan menggunakan metode/tools Penilaian Maturitas SPIP.

Penilaian maturitas SPIP tahun 2020 ini telah dilaksanakan pada minggu ke-3 Desember 2020 dan difokuskan pada unit eselon I dan satker dengan mempertimbangkan keterwakilan fungsi, anggaran, dan satker vertikal yang mempunyai nilai maturitas dibawah 3, serta satker yang belum dinilai di tahun 2019. 12 (dua belas) satker yang dinilai adalah Sekretariat Jenderal, BPSDMI, Inspektorat Jenderal, Balai Besar Keramik Bandung, Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru, Politeknik AKA Bogor, Politeknik ATI Padang, Politeknik Morowali, Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal, SMK-SMAK Bogor dan Balai Diklat Industri Surabaya. Sampai dengan laporan ini disusun hasil penilaian rata-rata mencapai level 3, yang artinya target kinerja pada indikator kinerja terkait telah tercapai pada Triwulan IV ini.

## **5. Dokumen-Dokumen Perencanaan Inspektorat Jenderal**

Dokumen perencanaan yang telah diselesaikan pada triwulan IV ini antara lain:

- a) Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal 2020-2024;
- b) Dokumen Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2021;
- c) Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2021.

Dokumen-dokumen tersebut telah selesai disusun, namun masih dalam proses legalisasi.

## **6. Reviu Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal**

Pada tanggal 8 Oktober 2020, telah dilakukan rapat reviu dokumen Perjanjian Kinerja yang dihadiri oleh para eselon II, eselon III, eselon IV dan para pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal. Hasil dari rapat tersebut antara lain akan dilakukan perubahan pada beberapa indikator yang tidak lagi relevan dengan kondisi dan anggaran Inspektorat Jenderal pada triwulan ini.

## **7. Perumusan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Tata Bisnis Inspektorat Jenderal**

Rapat koordinasi dalam rangka perumusan SOTK dan Proses Bisnis Inspektorat Jenderal telah diadakan sebanyak 3 (tiga) kali selama bulan November dan sudah pada tahap pembahasan final dengan Biro OSDM pada tanggal 27 Desember 2020.

## **8. Rapat Koordinasi Pengawasan**

Telah dilaksanakan rapat koordinasi pengawasan pada tanggal 10 s.d. 11 November 2020 dengan tema “Sinergi Pengawasan Internal dalam Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Industri Nasional”. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan sinergi pengawalan program di lingkungan Kementerian Perindustrian yang diikuti oleh seluruh satker binaan Inspektorat Jenderal serta Disperindag Provinsi seluruh Indonesia.

## **9. Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP)**

Dalam rangka penataan tata laksana yang efektif dan efisien di lingkungan

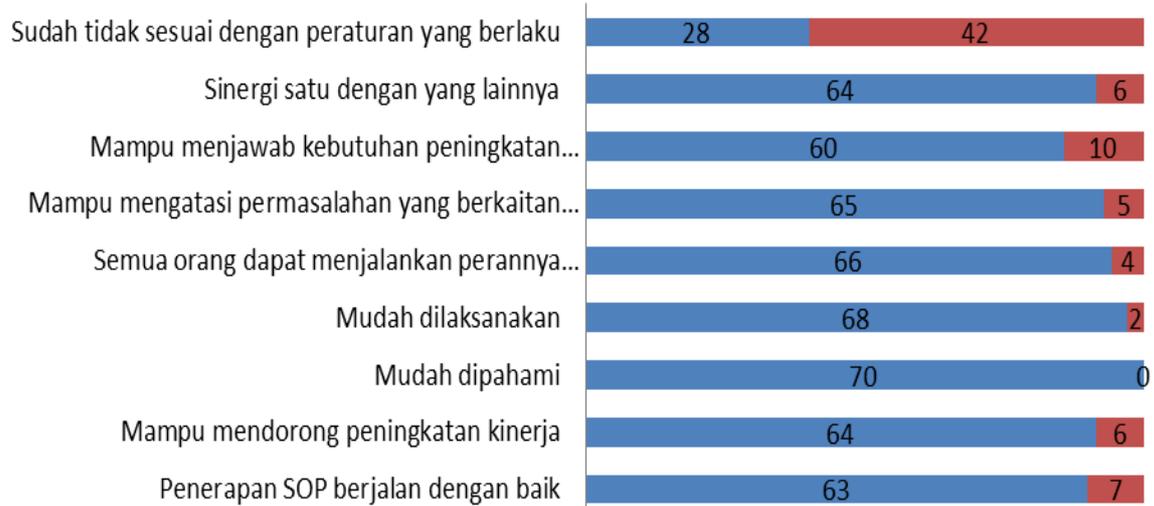
Inspektorat Jenderal sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 12 dan pasal 16 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/8/2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap SOP AP yang harus diisi oleh para Kepala Bagian, para Kepala Sub Bagian sebagai penanggung jawab kegiatan pada bulan September 2020. Berikut ini adalah hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap 85 SOP AP yang ada di Inspektorat Jenderal, hasil penyusunan/penyempurnaan Tahun 2019 yang diperoleh draft laporannya pada awal November 2020. Rincian SOP AP tersebut adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Bagian/Unit</b>	<b>Jumlah SOP AP</b>
1.	Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	10
2.	Bagian PTL dan EHP	5
3.	Bagian Keuangan dan Umum	22
4.	Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi	18
5.	Inspektorat I	7
6.	Inspektorat II	6
7.	Inspektorat III	7
8.	Inspektorat IV	10
<b>Jumlah</b>		<b>85</b>

Berdasarkan rekapitulasi hasil pengisian formulir monitoring dan evaluasi SOP AP, SOP AP yang telah dimonitoring dan dievaluasi berjumlah 70 SOP AP, sedangkan sebanyak 15 SOP AP terkait ketatausahaan, kearsipan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan BMN belum ada hasil monitoring dan evaluasinya. Rekapitulasi hasil pengisian formulir monitoring dan evaluasi SOP digambarkan pada grafik di bawah ini.

### Monitoring & Evaluasi SOP AP

■ Ya ■ Tidak



Jumlah responden yang mengisi form evaluasi SOP ini adalah sebanyak 27 pegawai dengan hasil sebagai berikut:

No	Unit	Jumlah Pegawai	Jumlah Responden	%Responden terhadap Jumlah Pegawai
1	Sekretariat Itjen	63	21	33.33%
2	Inspektorat I	17	-	-
3	Inspektorat II	15	2	11.76%
4	Inspektorat III	18	3	16.67%
5	Inspektorat IV	17	1	5.88%
Jumlah		133	27	20.30%

## 10. Pengelolaan Kepegawaian

Dalam rangka pengelolaan kepegawaian, telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan data pegawai yang akan mengikuti *SWAB test* dan vaksinasi yang telah dilaksanakan di bulan Oktober- Desember 2020;
- b. Memantau absensi dan pelaporan pegawai Itjen;
- c. Mengikuti rapat SOTK Itjen baik Internal maupun Eksternal;
- d. Membuat Draft SK perpindahan auditor utama an. Edy Waspan;
- e. Mengecek dokumen peralihan jenjang auditor muda an Rayersaad dan M Adhi R;
- f. Melaksanakan *Teleconference* Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) Penilaian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK);
- g. Pengecekan dokumen inpassing jabfung Perbendaharaan a.n. Ira Sukmayanti, Sutarno dan Munawir;
- h. Mengikuti Penilaian Teleconference AK Smt I Tahun 2020 secara Daring 21-23 Oktober 2020;
- i. Mengikuti Rapat Teleconference Monev Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2019 bersama Biro OSDM; serta
- j. Menyiapkan Penetapan AK auditor hasil Penilaian AK;
- k. Memantau pegawai yang terinfeksi COVID-19.
- l. Berdasarkan hasil *Swab test* yang telah dilakukan, selama bulan Oktober hingga Desember, beberapa pegawai Inspektorat Jenderal yang terpapar Covid-19 telah dilakukan tindakan sesuai dengan SOP sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor 02/SJ-IND/KP/X/2020 tentang Prosedur Penanganan Pandemi Covid-19 di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

## 11. Penyusunan Peraturan

Penyusunan peraturan di Lingkungan Inspektorat Jenderal, masih melanjutkan kegiatan dari bulan September, yaitu:

- a. Penyusunan konsep pedoman audit kinerja penumbuhan dan pengembangan pada Ditjen IKMA pada tahap finalisasi dengan target penyelesaian sampai akhir tahun 2020;
- b. Pembahasan Pedoman Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor; dan

- c. Konsep Peraturan Inspektur Jenderal tentang Telaah Sejawat Internal dan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Telaah Sejawat Eksternal telah disusun dan diserahkan ke Inspektur Jenderal;
- d. Pedoman penyusunan penilaian SAKIP;
- e. Pedoman Konsultasi;
- f. Pedoman Audit Berbasis Resiko;
- g. Pedoman Kendali Mutu dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan;
- h. Penyusunan PKPT berbasis Resiko;

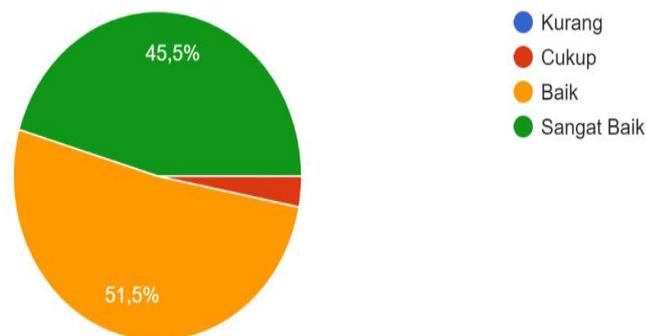
Sampai dengan bulan Desember 2020, Penyusunan peraturan telah selesai sesuai target dalam bentuk *Draft*.

## 12. Survei Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal

Telah dilaksanakan e-survei pada akhir tahun 2020 sesuai Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 689/IJ- IND.1/PR/XI/2020 tanggal 3 November 2020 untuk mengetahui persepsi auditi terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal.

Dari hasil survei diperoleh bahwa sebagian besar responden/ auditi (97%) menilai bahwa pelayanan Inspektorat Jenderal telah dilaksanakan secara baik.

Penilaian terhadap pelayanan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian  
66 tanggapan



Beberapa saran yang masuk dari survei tersebut dan perlu dipertimbangkan adalah:

- a) Beberapa penerapan kebijakan terkesan kaku walaupun sebetulnya dalam aturan tidak eksplisit diatur demikian. Selain dari itu, kebijakan antara setiap Inspektorat

berbeda. Hal ini menimbulkan ketidakadilan pada saat kebijakan tersebut dibandingkan antara penerapan di unit Eselon 1 yang berbeda. Untuk itu perlu keseragaman atau standar antar Inspektorat agar perlakuan ke auditi juga sama;

- b) Auditi memerlukan manajemen waktu dan proses dalam tindakan perbaikan untuk setiap ketidaksesuaian/temuan;
- c) Auditor sudah memenuhi standar sesuai kompetensi, namun perlu dilakukan peningkatan wawasan dengan melakukan brainstorming dengan K/L lain;
- d) Auditor diharapkan tetap profesionalisme dan lebih meningkatkan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan.

Adapun progres capaian dari Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal pada Triwulan IVI diinformasikan pada tabel berikut :

Tabel 11. Progres Capaian Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal TW IV

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW IV	Keterangan
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1.5%	Realisasi Anggaran Kemenperin TA 2019: Rp 3,368,036,653,338 Temuan BPK: Rp 4,967,582,710.63 Maka, <u>Temuan BPK</u> Realisasi Anggaran Kemenperin = 0.15 %	
		2. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	10 %	Total Rekomendasi: 552 Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti : 0  Maka target telah tercapai, karena realisasi 0% (Rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti tidak lebih dari 10%	
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	80%	Realisasi 90%	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW IV	Keterangan
		4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	91%	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Total Rekomendasi untuk seluruh satker: terdapat 552 rekomendasi</li> <li>✓ Rekomendasi yang telah sesuai: 294 .</li> <li>✓ Rekomendasi yang belum sesuai: 79</li> <li>✓ Temuan yang belum ditindaklanjuti: 179</li> <li>✓ Maka realisasi hingga TW IV yaitu 67.57%</li> </ul>	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Nilai RB area penguatan pengawasan	70%	Berdasarkan data terlampir, <u>Jumlah Indeks RB</u> Jumlah nilai max dalam penilaian RB  $= (5.16 / 6.25) * 100\% = 82.56\%$ dibulatkan menjadi 83%	
		2. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	Setelah melakukan penilaian maturitas SPIP secara online, maka penilaian rata-rata telah mencapai level 3	
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan pengisian kuesioner secara <i>online</i> melalui masing-masing kepala	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW IV	Keterangan
				satuan kerja. Realisasi indikator kinerja ini 97.2%	
		2. Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Kondisi saat ini Unit Inspektorat Jenderal berada pada Level 3 IACM berdasarkan penilaian BPKP Tahun 2019	

**Keterangan :**



: Telah tercapai



: Dalam proses pelaksanaan



: Tidak tercapai

### III.3. Hambatan dan Kendala

Pada Triwulan IV Tahun 2020, terdapat beberapa *output* (keluaran) Inspektorat Jenderal yang telah dilaksanakan mayoritas telah sesuai dengan target yang ditentukan. Namun, masih ada satu indikator kinerja yang tidak tercapai targetnya serta perlu evaluasi untuk mengatasi beberapa kendala yang teridentifikasi hingga Triwulan IV, antara lain:

- 1) Kegiatan pengawasan ke satker vertikal mengalami penundaan/pergeseran yang diakibatkan pandemik Covid-19 di seluruh Indonesia, sehingga perlu dilakukan penyesuaian jadwal Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2020;
- 2) Adanya realokasi anggaran BPSDMI dengan seluruh satker vertikal (sekolah dan balai diklat) serta Sekretariat Jenderal dengan seluruh Biro-Biro, sehingga perlu dilakukan revaluasi anggaran kembali;
- 3) Sampai saat terakhir laporan ini dibuat, masih terdapat perbedaan realisasi keuangan yang belum diinput dari bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal, sehingga realisasi keuangan dari aplikasi PP39 dengan e-Monitoring perbedaannya cukup signifikan.
- 4) Terdapat ketidaksesuaian realisasi anggaran antara aplikasi PP39 dan aplikasi SAS yang disebabkan realisasi anggaran dalam aplikasi PP39 masih terdapat SPTJB yang belum keluar Nomor dan Tanggal SP2D-nya.
- 5) Pelaksanaan kegiatan Inspektorat II pada Triwulan IV Tahun 2020 mengalami kendala yang cukup berarti, dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penghematan anggaran Inspektorat II sejumlah Rp 2,480,325,000,- sehingga pagu Inspektorat II pada Triwulan IV tahun 2020 menjadi sebesar Rp 958,392,000,- selain itu juga terjadi perubahan pola kerja dari *work from office* (WFO) ke *work from home* (WFH) sehingga Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) perlu di revisi, untuk realisasi kegiatan pengawasan kurang optimal mengingat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi kegiatan perjalanan dinas keluar kota.
- 6) Terdapat Indikator Kinerja yang tidak mencapai target 91%, yaitu Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang telah ditindaklanjuti oleh satker, indikator ini bahkan merupakan Indikator Kinerja Utama, maka hal ini perlu dilakukan perbaikan.
- 7) Adanya Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S16/PB/PB.6/2020 perihal Penyampaian *Frequently Asked Question* (FAQ) Penggunaan Akun Khusus Belanja Dampak dan Penanganan Pandemi Covid-

19. Surat Edaran tersebut menjelaskan bahwa kegiatan yang tidak terkait langsung harus menggunakan akun biasa. Sementara selama ini telah dilakukan penyesuaian akun kegiatan dengan menggunakan akun Covid-19. Hal ini menyebabkan beberapa kali penggantian akun belanja dan menyebabkan proses pencairan anggaran sedikit terhambat;

#### **III.4. Langkah Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut dari adanya kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan IV ini dan bertepatan dengan era *new normal*, maka Inspektorat Jenderal mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga realisasi anggaran di PP39 sesuai dengan realiasi anggaran sesungguhnya.
2. Meningkatkan koordinasi internal agar kegiatan sesuai dengan perencanaan dan waktu yang telah ditetapkan.
3. Penjadwalan dan penganggaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi saat ini agar realisasi dapat tercapai sesuai target.
4. Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk segera mengatasi hambatan penginputan SPTJB pada Tahun Anggaran 2020
5. Berkoordinasi dengan Bagian Program Evaluasi, dan Pelaporan untuk segera mengatasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pada TA 2020.
6. Masing-masing Inspektorat perlu mengkoordinasikan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dengan satker cakupan tugas dengan menyusun rencana aksi, dan perlu segera menyusun SOP Penyelesaian Tindak Lanjut.
7. Terkait Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S16/PB/PB.6/2020 perihal Penyampaian *Frequently Asked Question* (FAQ) Dalam pelaksanaan revisi untuk penyesuaian akun peruntukan penanganan Covid-19 dapat terus dilanjutkan pelaksanaannya sampai batas waktu penyelesaian yang akan diinformasikan lebih lanjut oleh Dirjen Perbendaharaan dalam bentuk Surat/Perdirjen.

## BAB IV PENUTUP

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 (Januari-Desember) mencapai Rp 29,151,228,596,- atau 96.81 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 30,111,422,000,-. Angka-angka capaian kinerja kegiatan tersebut merupakan nilai tertimbang dari kemampuan penyerapan anggaran dan pencapaian realisasi fisik dari total anggaran yang ada pada Inspektorat Jenderal.

Terkait dengan merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang di dalamnya menyatakan bahwa anggaran pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dialokasikan untuk mempercepat penanganan Covid-19 serta mempercepat *refocussing* kegiatan dari realokasi anggaran melalui revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

Untuk selanjutnya perlu koordinasi internal maupun eksternal untuk menjamin realisasi anggaran dan kegiatan sesuai dengan target. Selain itu perlu diadakannya redesain sistem perencanaan dan penganggaran sesuai dengan Surat Edaran Bersama yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2020 oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan No. S-122/MK.2/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Hal ini perlu dilakukan agar anggaran menjadi lebih efisien dengan menggunakan metode *Zero Based Budgeting* serta meningkatkan keselerasan rumusan Program dan Kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.

Informasi capaian kinerja Triwulan IV ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan, agar target kinerja yang akan dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2021 dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.

# LAMPIRAN

Lampiran : Nilai PMPRB Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian

**NILAI PMPRB UNIT KERJA ESELON I KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020**

No	UNIT ESELON I	PEMENUHAN			REFORM			TOTAL PENGUNGKIT		
		B Maks	NA	PN	B Maks	NA	PN	B Maks	NA	PN
1.	Sekretariat Jenderal	14,60	13,82	94,66%	21,70	18,30		36,30	32,13	88,51%
2.	Inspektorat Jenderal	14,60	13,51	92,53%	21,70	19,49	89,82%	36,30	33,00	90,91%
3.	Ditjen Industri Agro	14,60	13,82	94,66%	21,70	20,74	95,58%	36,30	34,55	95,18%
4.	Ditjen ILMATE	14,60	13,51	92,53%	21,70	20,87	96,17%	36,30	34,37	94,68%
5.	Ditjen IKMA	14,60	13,76	94,25%	21,70	20,73	95,53%	36,30	34,49	95,01%
6.	Ditjen IKFT	14,60	14,12	96,71%	21,70	20,33	93,67%	36,30	34,45	94,90%
7.	Ditjen KPAIL	14,60	13,60	93,15%	21,70	18,85	86,87%	36,30	32,45	89,39%
8.	BPSDMI	14,60	13,91	95,27%	21,70	19,90	91,70%	36,30	33,82	93,17%
9.	BPPI	14,60	13,96	95,62%	21,70	20,50	94,47%	36,30	34,45	94,90%
	<b>Rata-Rata Nilai</b>	<b>14,60</b>	<b>13,78</b>	<b>94,37%</b>	<b>21,70</b>	<b>19,97</b>	<b>92,01%</b>	<b>36,30</b>	<b>33,74</b>	<b>92,96%</b>

**Keterangan :**

**B Maks** : Bobot Maksimal

**NA** : Nilai Akhir

**PN** : Persentase Nilai (%)

**NILAI PMPRB UNIT PUSAT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2020**

<b>KOMPONEN</b>		<b>BOBOT MAKSIMAL</b>	<b>NILAI AKHIR</b>	<b>PERSEN NILAI (%)</b>
<b>A. PENGUNGKIT</b>				
	I. Pemenuhan	20,00	18,44	92,20
	II. Hasil Antara	10,00	5,62	56,20
	III. Reform	30,00	21,24	70,80
	<b>SUB TOTAL (A)</b>	<b>60,00</b>	<b>45,30</b>	<b>75,50</b>
<b>B. HASIL</b>				
	1. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,46	84,60
	2. Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,50	75,00
	3. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN	10,00	9,10	91,00
	4. Kinerja Organisasi	10,00	7,20	72,00
	<b>SUB TOTAL (B)</b>	<b>40,00</b>	<b>32,26</b>	<b>80,65</b>
	<b>TOTAL (A + B)</b>	<b>100,00</b>	<b>77,56</b>	<b>77,56</b>